

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Collective Action telah menjadi sorotan penting dalam kajian psikologi sosial terutama setelah munculnya berbagai gerakan protes internasional salah satunya *Black Lives Matters* (Marshall dkk., 2022). Indonesia sendiri tidak luput dari dinamika *Collective Action* yang semakin intens, khususnya dalam periode Agustus hingga September 2025 yang menjadi tonggak sejarah baru dalam demokrasi Indonesia.

Pada tanggal 25 Agustus 2025, Indonesia mengalami gelombang demonstrasi besar-besaran yang dimulai dari protes terhadap anggaran DPR yang dinilai berlebihan. Unjuk rasa yang semula berlangsung damai kemudian berkembang menjadi *Collective Action* massal yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek *online*. Permasalahan spesifik yang memicu *Collective Action* ini adalah kenaikan drastis anggaran DPR dari Rp. 5,4 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp. 9,9 triliun pada RAPBN 2026, atau meningkat sekitar 83% (TEMPO, 2025). Kenaikan ini dianggap tidak proporsional di tengah kondisi ekonomi yang menantang bagi masyarakat, diperparah dengan adanya rencana tunjangan perumahan sebesar Rp. 50 juta per bulan untuk setiap anggota DPR yang dipersepsikan sebagai pelanggaran fundamental terhadap keadilan ekonomi dan hak rakyat untuk hidup sejahtera. Situasi ini menciptakan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat luas, yang kemudian memicu respons kolektif dalam bentuk demonstrasi massal (Fitriyani & Gunanto, 2025).

Fenomena ini mencapai puncaknya dengan munculnya gerakan “Tuntutan Rakyat 17+8”. (TEMPO, 2025). Tuntutan 17+8 yang dirumuskan pada 1 September 2025 mencakup 17 tuntutan jangka pendek (dengan batas waktu 5 September 2025) dan 8 tuntutan jangka panjang (batas waktu 31 Agustus 2026), yang ditujukan kepada berbagai lembaga pemerintah termasuk Presiden, DPR, partai politik, kepolisian, TNI dan kementerian sektor ekonomi (Tim Bijak, 2025). Fenomena *Collective Action* oleh mahasiswa dalam gerakan Tuntutan Rakyat 17+8 ini merupakan konteks yang unik untuk memahami mekanisme psikologis yang

mendasari *Collective Action*, khususnya dalam budaya kolektivis Asia Tenggara. Ada tiga karakteristik signifikan yang membedakan gerakan ini dari protes lainnya.

Pertama, gerakan ini menggabungkan dimensi isu yang kompleks dan beragam segi: ketidakadilan ekonomi (anggaran DPR berlebihan), ketidakadilan sosial (peningkatan biaya hidup, pemutusan hubungan kerja massal), pelanggaran hak asasi manusia (tindakan represif polisi), dan isu-isu struktural (transparansi, akuntabilitas pemerintah) (Firdaus, 2025). Integrasi dari berbagai fakta ini menunjukkan bahwa motivasi aksi bukan semata instrumental atau berbasis kepentingan material personal, melainkan juga berkaitan dengan pelanggaran prinsip-prinsip moral mendasar tentang keadilan sosial dan hak-hak dasar.

Kedua, gerakan ini memanfaatkan secara signifikan platform media sosial untuk koordinasi, mobilisasi dan diseminasi narasi tuntutan (Firdaus, 2025). *Influencer* dan aktivis media sosial memainkan peran penting dalam merumuskan dan menyebarkan kerangka “Tuntutan Rakyat 17+8”, menciptakan struktur kognitif dan emosional yang memungkinkan koordinasi skala besar tanpa organisasi formal. Peran teknologi komunikasi ini relevan untuk memahami bagaimana identitas kolektif terbentuk dan diperkuat dalam era digital.

Ketiga, gerakan ini berasal dari kebudayaan kolektivis Asia Tenggara yang memiliki tingkat *power distance* yang tinggi (Hofstede, 2001; Triandis, 1995). Terkait hal demografi ini, pelanggaran terhadap keadilan sosial dan hak-hak kolektif kemungkinan memiliki hubungan psikologis yang berbeda dibandingkan konteks budaya individualis Barat. Dinamika identitas terpolitisasi, emosi berbasis kelompok, dan kepercayaan akan efikasi kolektif kemungkinan menunjukkan pola yang unik dan memerlukan pemahaman kontekstual yang lebih mendalam.

Collective Action terutama yang dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia pada periode Agustus-September 2025 ini memberikan kesempatan unik untuk menganalisis dinamika psikologis yang mendasari perilaku kolektif dalam konteks budaya Indonesia. Salah satu kerangka teoritis yang paling relevan untuk memahami fenomena ini adalah *Extended Social Identity Model of Collective Action* (ESIMCA) yang dikembangkan oleh van Zomeren, Kutlaca, dan Turner-Zwinkles (2018). Model ini telah mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis

tentang *Collective Action*, termasuk teori identitas sosial, teori deprivasi relatif, dan pendekatan mobilisasi sumber daya (van Zomeren dkk., 2012).

ESIMCA adalah model yang diperluas dari *Social Identity Model of Collective Action* (SIMCA) yang sebelumnya diusulkan juga oleh van Zomeren, Postmes, dan Spears (2008), yang berdasarkan meta-analisis terhadap 182 studi tentang aksi kolektif (van Zomeren dkk., 2008). Dalam model SIMCA para peneliti menyatakan bahwa *Collective Action* dimotivasi oleh tiga variabel inti: (1) persepsi *injustice* atau ketidakadilan yang dirasakan, (2) *Group-Based Anger* atau *Group-Based Anger*, dan (3) *Group Efficacy* atau keyakinan *Group Efficacy* (dengan identitas sosial berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan ketiga komponen tersebut (van Zomeren dkk., 2008, 2012).

Perkembangan pada penelitian selanjutnya, van Zomeren, Kutlaca, dan Turner-Zwinkles (2012) mengintegrasikan konsep *Moral Conviction* atau keyakinan yang kuat dan absolut tentang apa yang benar dan salah, sebagai variabel yang memprediksi *Collective Action* melalui jalur *Politicized Identity*, *Group-Based Anger*, dan *Group Efficacy* (van Zomeren dkk., 2011, 2012). Perluasan model ini juga menekankan pentingnya memahami tidak hanya “siapa kita” (identitas kelompok) tetapi juga “apa yang kita perjuangkan” (keyakinan moral) dalam memotivasi *Collective Action* (van Zomeren dkk., 2018). Integrasi model ini berasal dari konsep *normative fit* dari *Self-Categorization Theory*, yang mengacu pada sejauh mana perilaku atau atribut yang dipersepsikan sesuai dengan ekspektasi berlandaskan pengetahuan tentang kategori sosial (van Zomeren dkk., 2018). Dalam *Collective Action*, pelanggaran keyakinan moral menciptakan kategori sosial yang “*fit*” secara normatif untuk bertindak kolektif. Sebagai contoh, ketika anggaran DPR berlebihan dipersepsikan sebagai pelanggaran terhadap keadilan ekonomi, kategori “rakyat yang berjuang untuk keadilan” menjadi kategori yang normatif dan *self-relevant*.

Penelitian terdahulu milik van Zomeren, Kutlaca, dan Turner-Zwinkels (2018) mengenai ESIMCA, menjelaskan bahwa keyakinan moral yang relevan untuk *Collective Action* tidak terbatas hanya pada *Moral Conviction* saja yang bersifat *issue-specific* dan absolut, melainkan mencakup lingkup yang lebih luas dari bentuk-bentuk keyakinan moral: nilai-nilai (*values*), persepsi tentang hak-hak

(*rights*), dan norma-norma sosial (*social norms*). Dalam konteks budaya kolektivis Asia Tenggara, model yang dikembangkan bisa sangat relevan karena keyakinan moral dalam budaya tersebut seringkali lebih berkaitan dengan norma sosial, nilai-nilai komunitas, dan paham tentang tanggung jawab bersama daripada absolutisme individual (Hofstede, 2001; Triandis, 1995).

Pada penelitian model ESIMCA sebelumnya juga dijelaskan bahwa penting untuk memahami apa yang dimaksud ketika seseorang mengidentifikasi diri dengan suatu kelompok sosial atau yang disebut konten identitas, bukan hanya seberapa kuat identifikasi tersebut (van Zomeren dkk., 2018). Identifikasi dengan kategori yang sama (“wanita”, “mahasiswa”, atau “rakyat”) memiliki makna yang sangat berbeda tergantung pada konten identitasnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *Politicized Identity* (*politicized identity*) merupakan identitas yang dikaitkan dengan perjuangan untuk perubahan sosial atau memiliki pesan secara intrinsik *action-oriented*, serta mencakup pemahaman tentang posisi kelompok dalam struktur kekuasaan sosial dan komitmen terhadap perubahan (Stürmer & Simon, 2004; van Zomeren dkk., 2018).

Penelitian literatur mengenai SIMCA dan ESIMCA telah banyak ditunjukkan validitasnya di berbagai negara termasuk Afrika Selatan, Libanon, Spanyol, Amerika Serikat, dan Italia, penelitian dalam konteks Asia Tenggara khususnya Indonesia masih sangat terbatas (van Zomeren dkk., 2008, 2018). Studi tentang *Collective Action* dalam konteks Asia, termasuk Indonesia, menunjukkan beberapa perbedaan dengan temuan dari negara-negara Barat. Penelitian di Vietnam menunjukkan bahwa *Group Efficacy* tidak selalu memprediksi *Collective Action* dalam konteks budaya kolektivis. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami bagaimana faktor budaya dan konteks sosial-politik spesifik mempengaruhi dinamika *Collective Action* (Nguyen dkk., 2021).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai *moral beliefs* dalam *Collective Action* (khususnya *Moral Conviction*) dilakukan dalam konteks Barat dan menggunakan populasi yang sebagian besar individualis (Skitka dkk., 2005; Thomas & McGarty, 2009; Turner-Zwinkels dkk., 2017). Pemahaman tentang bagaimana keyakinan moral yang teramati dalam budaya kolektivis, yang kemungkinan lebih

menekankan tanggung jawab sosial, norma-norma komunitas, dan kepedulian bersama dalam mempengaruhi *Collective Action* masih terbatas.

ESIMCA menekankan pentingnya *Politicized Identity*, sebagian besar penelitian sebelumnya mengukur identitas hanya melalui *strength of identification*, bukan identitas yang terpolitisasi itu sendiri (van Zomeren dkk., 2018). Operasionalisasi yang lebih mendalam tentang *Politicized Identity* dalam konteks gerakan Tuntutan Rakyat 17+8 dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna yang diasosiasikan mahasiswa dengan identitas kolektif mereka.

Urgensi dari penelitian ini dikarenakan beberapa alasan. Pertama, dengan menerapkan ESIMCA, penelitian ini dapat menjelaskan dan memahami motivasi *Collective Action* mahasiswa di Indonesia yang berpartisipasi dalam gerakan Tuntutan Rakyat 17+8. Kontribusi penelitian ini dapat diidentifikasi dengan memberikan bukti empiris tentang validitas dan liabilitas ESIMCA dalam konteks budaya kolektivis negara Indonesia. Kedua, penelitian ini dapat mengembangkan operasionalisasi dan instrumen pengukuran yang lebih mendalam untuk variabel-variabel ESIMCA, sehingga instrumen-instrumen ini dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. Ketiga, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang mekanisme psikologis yang memotivasi *Collective Action* untuk dapat membantu pemerintah, pembuat kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang respons yang lebih responsif dan efektif terhadap mobilisasi sosial, serta dalam mengurangi eskalasi konflik.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, identifikasi masalah penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam antara lain:

1. Interaksi antara *Moral Conviction* dengan *Politicized Identity* dalam memotivasi *Collective Action* mahasiswa dalam gerakan Tuntutan Rakyat 17+8 masih belum jelas terlihat.
2. Meski *Group-Based Anger* dan *Group Efficacy* dimiliki oleh mahasiswa yang berpartisipasi dalam gerakan Tuntutan Rakyat 17+8, *Moral Conviction*

dan *Politicized Identity* menjadi faktor utama dalam mempengaruhi keputusan untuk terlibat dalam aksi.

3. Peran media sosial terhadap informasi tentang ketidakadilan (berita tentang anggaran DPR, testimoni tentang PHK massal), pada akhirnya meningkatkan motivasi mahasiswa untuk ikut dalam gerakan Tuntutan Rakyat 17+8.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memberikan fokus yang jelas dan mendalam, penelitian ini menggunakan *Extended Social Identity Model of Collective Action* (ESIMCA) yang dikembangkan oleh van Zomeren, Kutlaca, dan Turner-Zwinkle (2018) sebagai kerangka teoritis utama, dengan fokus pada lima variabel kunci: *Moral Conviction*, *Politicized Identity*, *Group-Based Anger*, *Group Efficacy*, dan *Collective Action*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Extended Social Identity Model of Collective Action* (ESIMCA) menjelaskan dan memprediksi keterlibatan mahasiswa dalam gerakan Tuntutan Rakyat 17+8?
2. Bagaimana pengaruh antara *Moral Conviction* dan *Politicized Identity* terhadap *Collective Action* pada keterlibatan mahasiswa dalam gerakan Tuntutan Rakyat 17+8?
3. Bagaimana pengaruh *Moral Conviction* terhadap *Group-Based Anger* untuk mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam gerakan Tuntutan Rakyat 17+8?
4. Bagaimana pengaruh *Politicized Identity* terhadap *Group Efficacy* untuk mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam gerakan Tuntutan Rakyat 17+8?
5. Bagaimana *Group-Based Anger* dan *Group Efficacy* sebagai mediator mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam gerakan Tuntutan Rakyat 17+8?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami motivasi *Collective Action* mahasiswa di Indonesia yang turut berpartisipasi dalam gerakan Tuntutan Rakyat 17+8 melalui penerapan dan validasi *Extended Social Identity Model of Collective Action* (ESIMCA) dalam konteks budaya kolektivis Indonesia. Sehingga penelitian ini dapat mengidentifikasi perbedaan atau variasi dalam pola relasi model berdasarkan faktor demografis dan kontekstual.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan *Extended Social Identity Model of Collective Action* (ESIMCA) di luar konteks Barat, khususnya dalam budaya kolektivis dengan *power distance* tinggi. Sehingga penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana konseptual model ini dapat diadaptasi untuk berbagai konteks budaya khususnya di Asia Tenggara.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dan *stakeholder* terkait dalam memahami dinamika psikologis yang mendasari *Collective Action* di Indonesia, sehingga dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam pengelolaan isu-isu sosial. Selain itu dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi rakyat dan mengurangi potensi konflik sosial.

1.6.2.2 Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini akan menghasilkan instrumen pengukuran yang telah diadaptasi dan divalidasi untuk konteks Indonesia yang dapat digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya tentang *Collective Action* di Asia Tenggara. Selain itu, data empiris yang komprehensif tentang motivasi *Collective Action* mahasiswa Indonesia dapat menjadi fondasi untuk penelitian sekunder dan studi komparatif lintas budaya. Metodologi

penelitian yang dikembangkan dapat juga diadopsi oleh peneliti lain untuk konteks dan populasi yang berbeda.

1.6.2.3 Bagi Organisasi dan Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang mekanisme yang memotivasi *Collective Action* untuk membantu organisasi dan mahasiswa merancang kampanye serta mobilisasi yang lebih efektif dan berpengaruh dengan nilai-nilai publik.

1.7 *State of The Art*

Penelitian tentang *Collective Action* telah mengalami perkembangan signifikan dalam tiga dekade terakhir, dengan berbagai pendekatan teoritis yang berusaha menjelaskan mengapa individu memilih untuk berpartisipasi dalam *Collective Action*. Tiga perspektif utama yang dominan dalam literatur adalah pendekatan deprivasi relatif, pendekatan mobilisasi sumber daya, dan pendekatan identitas sosial (van Zomeren dkk., 2008).

Pendekatan deprivasi relatif, yang berkembang dari karya Stouffer dkk. (1949), menekankan pentingnya persepsi ketidakadilan sebagai motivator utama *Collective Action*. Teori ini mengusulkan bahwa individu tidak hanya merespons kondisi objektif, tetapi lebih pada persepsi subjektif tentang ketidakadilan yang dialami kelompok mereka. Meta-analisis oleh Smith & Ortiz (2001) menunjukkan bahwa komponen afektif dari deprivasi relatif (seperti *Group-Based Anger*) lebih kuat dalam memprediksi *Collective Action* dibandingkan komponen kognitif.

Pendekatan mobilisasi sumber daya, yang dipengaruhi oleh teori pilihan rasional, menekankan pentingnya keyakinan efikasi dalam memotivasi *Collective Action*. Klandermans (1984) mengintegrasikan elemen subjektif dalam pendekatan ini dengan memperkenalkan konsep *Group Efficacy* (keyakinan bahwa kelompok mampu mencapai tujuannya melalui upaya kolektif). Penelitian menunjukkan bahwa *Group Efficacy* dapat memberikan prediksi yang konsisten untuk *Collective Action* dalam berbagai sudut pandang.

Pendekatan identitas sosial, yang didasarkan pada *Social Identity Theory* (Tajfel & Turner, 2001), menekankan pentingnya identifikasi kelompok dalam memotivasi *Collective Action*. Teori ini mengusulkan bahwa identitas sosial memberikan

platform psikologis untuk persepsi dan emosi berbasis kelompok. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa *Politicized Identity* lebih kuat dalam memprediksi *Collective Action* dibandingkan identitas kelompok yang lebih umum.

van Zomeren, Postmes, dan Spears (2008) mengintegrasikan ketiga pendekatan ini dalam *Social Identity Model of Collective Action* (SIMCA). Meta-analisis mereka terhadap 182 studi menunjukkan bahwa ketidakadilan yang dirasakan, *Group Efficacy*, dan identitas sosial masing-masing memberikan kontribusi unik dalam memprediksi *Collective Action*. Model ini mengusulkan bahwa identitas sosial berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan perspektif ketidakadilan dan efikasi.

van Zomeren, Postmes, dan Spears (2012) memperluas model SIMCA dengan mengintegrasikan *Moral Conviction* sebagai pendorong untuk *Collective Action*. Penelitian mereka menunjukkan bahwa keyakinan moral yang kuat dan absolut tentang isu moral tertentu dapat memotivasi individu untuk mengambil tindakan kolektif, terutama ketika keyakinan tersebut dilanggar. *Moral Conviction* terbukti memprediksi *Collective Action* atau *Collective Action* melalui *Politicized Identity*, *Group-Based Anger*, dan *Group Efficacy*.

Pengembangan terbaru oleh van Zomeren, Kutlaca, dan Turner-Zwinkles (2018) mengusulkan perluasan SIMCA yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan “siapa kita” dengan “apa yang kita (tidak akan) dukung”. Model ESIMCA ini menekankan pentingnya: (1) lingkup keyakinan moral yang lebih luas (tidak hanya *Moral Conviction*), (2) konten identitas sebagai operasionalisasi identitas sosial, dan (3) konsep *normative fit* yang menghubungkan keyakinan moral dengan identitas.

Meskipun telah terdapat kemajuan signifikan dalam pemahaman *Collective Action*, terdapat gap yang perlu diisi, antara lain: (1) keterbatasan penelitian dalam konteks non-Barat, terutama di negara-negara Asia Tenggara, (2) kurangnya penelitian yang mengintegrasikan dimensi moral yang lebih luas dalam konteks budaya kolektif, (3) pemahaman terbatas tentang peran media sosial dalam pembentukan *Politicized Identity*, dan (4) kurangnya penelitian longitudinal yang dapat menjelaskan dinamika dalam motivasi *Collective Action*.

Penelitian ini berusaha mengisi gap tersebut dengan mengaplikasikan ESIMCA dalam konteks spesifik Indonesia, khususnya dalam fenomena aksi Tuntutan Rakyat 17+8 yang memiliki karakteristik unik dalam hal mobilisasi melalui media sosial dan integrasi tuntutan-tuntutan moral-politik yang kompleks.

